



**RENCANA  
STRATEGIS  
(RENSTRA)  
SEKRETARIAT DPRD  
KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2023-2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas izin-Nya, Rencana Strategis (Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 dapat diselesaikan. Semoga atas izin-Nya pula Renstra ini dapat mengantarkan Sekretariat DPRD Kota Singkawang menjadi perangkat daerah yang terpercaya, Renstra ini disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Renstra Sekretariat DPRD merupakan salah satu perwujudan dan niat Sekretariat DPRD Kota Singkawang untuk mewujudkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik .

Seperti sudah kita ketahui bersama, bahwa Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 (Empat) tahunan dengan memperhitungkan dan mengeksplorasi berbagai faktor internal dan eksternal organisasi guna menetapkan arah pengembangan/perjalanan organisasi, tahapan serta strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kami menyadari bahwa Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026 ini belum sepenuhnya sempurna dan masih banyak kelemahan atau kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk kesempurnaan Renstra Sekretariat DPRD dimasa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Singkawang, Maret 2022  
Sekretaris DPRD Kota Singkawang



**KARIM, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641103 198510 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD.....	9
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Singkawang.....	9
2.2. Sumber daya Sekretariat DPRD Kota Singkawang.....	25
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang.....	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang .....	44
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD	46
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD.....	46
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD.....	49
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	52
4.1. Tujuan dan Sasaran.....	52
BAB V STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN.....	54
5.1. Strategis dan arah kebijakan.....	54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	55
6.1. Rencana Program dan Kegiatan.....	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	69
BAB VIII PENUTUP.....	70

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	25
Tabel 2.2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	25
Tabel 2.2.3	Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Menurut Golongan.....	26
Tabel 2.2.4	Pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjeangan.....	26
Tabel 2.2.5	Pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan Jabatan Struktural.....	26
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	28
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang.....	35
Tabel 2.5	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang.....	53
Tabel 2.6	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	54
Tabel 2.7	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Singkawang.....	57
Tabel 2.8	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan di Kota Singkawang, maka Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kota Singkawang perlu dilakukan review untuk mensinergikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Review Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kota Singkawang. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), antara lain ditandai dengan adanya tuntunan transparansi dan akuntabilitas kinerja serta keterlibatan seluruh stakeholder pembangunan. *Good governance* merupakan prasyarat mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan.

Perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk melakukan pengukuran kinerja. Lebih lanjut dalam pelaksanaannya Renstra Sekretariat DPRD dijabarkan dalam Renja Sekretariat DPRD yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan.

Kegiatan perumusan Renstra Sekretariat DPRD dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026, yang merupakan salah satu dokumen rujukan awal dalam penyusunan rancangan Renstra Sekretariat DPRD.

Untuk mendapatkan masukan guna penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra Sekretariat DPRD dilaksanakan Forum OPD yang melibatkan para pemangku kepentingan pelayanan Sekretariat DPRD, kesepakatan yang dihasilkan Forum OPD menjadi acuan untuk penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat DPRD menjadi rancangan akhir Renstra Sekretariat DPRD.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
  18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
  28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
  29. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
  30. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
  31. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
  32. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
  33. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang;
  34. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/431/SETDA.OR-A Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang tahun 2023-2026 dimaksudkan :

1. Merupakan penjabaran secara operasional tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan selama 4 (Empat) tahun.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang pelayanan, sehingga tujuan, program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tersebut dapat tercapai.
3. Dipergunakan sebagai tolak ukur kinerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kegiatan tahunan Sekretariat DPRD Kota Singkawang.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang tahun 2023-2026 ini antara lain :

1. Menjabarkan dan menyusun dasar perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2023-2026;
2. Untuk pedoman cara kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang terhadap pencapaian hasil yang diinginkan;
3. Untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan; bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Sekretaris DPRD Kota Singkawang berikutnya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang tahun 2023-2026 terdiri atas delapan bab, yang terdiri dari :

#### **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat penjelasan yang melatar belakangi penyusunan Renstra, diikuti dengan maksud dan tujuan, serta dasar-dasar kebijakan yang melandasinya. Kaitan dengan dokumen perencanaan lain juga disajikan, berikut sistematika penulisan.

Secara urut diatur dalam subbab a. Latar Belakang, b. Landasan Hukum, c. Maksud dan Tujuan dan e. Sistematika Penulisan.

## Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menggambarkan tentang kondisi umum Sekretariat DPRD Kota Singkawang berkenaan dengan struktur lembaga, tugas pokok dan fungsi serta keadaan personil. Lengkapnya bagian ini terdiri dari subbab a. Struktur Organisasi, b. Tugas Pokok dan Fungsi, c. Sumber Daya Aparatur

## Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini terdiri dari subbab a. Mengemukakan permasalahan yang mempengaruhi Pelayanan Sekretariat DPRD, b. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, c. Isu Strategis

## Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan, maka berkenaan dengan tugas Sekretariat DPRD Kota Singkawang secara khusus dijabarkan dalam subbab bagian ini, yaitu a. Tujuan dan Sasaran

## Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan, maka berkenaan dengan tugas Sekretariat DPRD Kota Singkawang dijabarkan dalam Strategi dan Arah Kebijakan.

## Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini menyampaikan program dan kegiatan prioritas selama kurun waktu empat tahun terhitung mulai tahun 2023 hingga tahun 2026, sebagai tindakan nyata yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Terdiri dari dua subbab yaitu a. Pemantauan Kinerja, dan b. Evaluasi Kinerja, dengan maksud menjelaskan tentang parameter yang digunakan dalam memantau pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Pada kelanjutannya parameter tersebut menjadi bagian bahan evaluasi kinerja lembaga, sehingga pengambilan keputusan terhadap kebijakan dan perubahannya dapat dilakukan dengan tepat.

## Bab VIII PENUTUP

Memuat kesimpulan atas substansi utama Revisi Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang disertai dengan kaidah pelaksanaan berisi catatan-catatan harapan lembaga atas keberhasilan pelaksanaan Revisi Renstra ini.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Singkawang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, yang selanjutnya ditegaskan dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang, telah dirubah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang. Serta Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/431/SETDA.OR-A Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang. Maka tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD terdapat perubahan sebagai berikut :

##### **1. Tugas Sekretariat DPRD:**

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

##### **2. Fungsi Sekretariat DPRD Kota Singkawang:**

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD melaksanakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan

- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris DPRD adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan Program Kerja Sekretariat DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- c. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD;
- d. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- e. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Susunan Organisasi :**

**Susunan Sekretariat DPRD terdiri dari :**

- 1. Sekretaris Dewan.
- 2. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:
  - a. Kelompok Sub-substansi Program dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  - c. Kelompok Sub-substansi Rumah Tangga.
- 3. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri dari:
  - a. Kelompok Sub-substansi Kajian Perundang-Undangan;
  - b. Kelompok Sub-substansi Persidangan dan Risalah;
  - c. Kelompok Sub-substansi Humas, Protokol dan Publikasi
- 4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari:
  - A. Kelompok Sub-substansi Fasilitasi Penganggaran;
  - B. Kelompok Sub-substansi Fasilitasi Pengawasan;
  - C. Kelompok Sub-substansi Kerjasama dan Aspirasi.

## **Kedudukan Sekretariat DPRD:**

1. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **1. Sekretaris Dewan**

Sekretaris Dewan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Bagian Umum dan Keuangan**

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang program dan Keuangan, tata usaha dan kepegawaian serta rumah tangga.

Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian umum dan Keuangan;
- b. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- c. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- d. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- f. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- g. Menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
- h. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- i. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
- k. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- m. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat

- DPRD;
- n. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
  - o. Menyelenggarakan penatausahaan Keuangan Sekretariat DPRD;
  - p. Melaksanakan pengelolaan Keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
  - q. Mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
  - r. Memverifikasi pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat DPRD;
  - s. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD;
  - t. Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan Keuangan Sekretariat DPRD;
  - u. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi Keuangan Sekretariat DPRD;
  - v. Menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan
  - w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Umum dan Keuangan mengoordinasikan Sub Bagian dan Kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

- 1) Kelompok Sub-substansi Program dan Keuangan, mempunyai tugas :
  - ◇ Menyusun rencana kegiatan bidang program dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Sekretariat DPRD;
  - ◇ Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
  - ◇ Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
  - ◇ Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang program dan Keuangan;
  - ◇ Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
  - ◇ Melakukan koordinasi dan penyusunan RKA, dokumen perubahan RKA, DPA, Perubahan DPA;
  - ◇ Melaksanakan administrasi Keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan DPRD dan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas DPRD dan ASN;
  - ◇ Melaksanakan pengelolaan Keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;

- ◊ Melakukan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan;
  - ◊ Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
  - ◊ Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi, koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan akhir tahun SKPD/laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran, penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan dan mengoordinasikan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
  - ◊ Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, *risk management* dan proses bisnis, standar pelayanan minimal;
  - ◊ Menyusun konsep naskah dinas bidang program dan Keuangan;
  - ◊ Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang program dan Keuangan yang telah dilaksanakan;
  - ◊ Melaporkan kegiatan bidang program dan Keuangan kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.
- 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- ◊ Menyusun rencana kegiatan bidang tata usaha dan kepegawaian berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Sekretariat DPRD;
  - ◊ Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan;
  - ◊ Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
  - ◊ Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang tata usaha dan kepegawaian;
  - ◊ Melaksanakan surat-menyurat, kearsipan dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD;
  - ◊ Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar dan tim ahli;
  - ◊ Melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor meliputi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor,

peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, bahan/material;

- ◊ Melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor meliputi jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum kantor;
- ◊ Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian, monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, koordinasi pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN);
- ◊ Melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan budaya kerja;
- ◊ Melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, SPIP dan survey kepuasan masyarakat;
- ◊ Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai, standar kompetensi jabatan;
- ◊ Melaksanakan layanan administrasi DPRD meliputi penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD, fasilitasi fraksi DPRD, fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD;
- ◊ Melaksanakan layanan kesejahteraan DPRD meliputi penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD, pelaksanaan *medical check up* DPRD;
- ◊ Melaksanakan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
- ◊ Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- ◊ Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD meliputi orientasi DPRD, pendalaman tugas DPRD;
- ◊ Melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip

dinamis, dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

- ◊ Menyusun konsep naskah dinas bidang tata usaha dan kepegawaian;
- ◊ Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang yang telah dilaksanakan;
- ◊ Melaporkan kegiatan bidang tata usaha dan kepegawaian kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan; dan
- ◊ Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

3) Kelompok Sub-substansi Rumah Tangga, mempunyai tugas:

- ◊ Menyusun rencana kegiatan bidang rumah tangga berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Sekretariat DPRD;
- ◊ Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan;
- ◊ Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- ◊ Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang rumah tangga;
- ◊ Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- ◊ Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah dan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- ◊ Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- ◊ Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD, serta kebutuhan rumah tangga DPRD;
- ◊ Mengatur dan memelihara kebersihan kantor, halaman, taman dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD dan rumah Pimpinan DPRD;
- ◊ Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD serta mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- ◊ Melaksanakan administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan,

koordinasi, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, rekonsiliasi, penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD serta kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD;

- ◊ Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi kendaraan, alat besar, alat angkutan, mebel, peralatan dan mesin, aset tetap dan aset tak berwujud, Gedung kantor/bangunan lainnya, sarana dan prasarana Gedung kantor/bangunan lainnya dan pendukung Gedung kantor/bangunan lainnya pada Sekretariat DPRD serta kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD;
- ◊ Melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan/dinas operasional atau lapangan, alat besar, alat angkutan darat tak bermotor pada Sekretariat DPRD serta kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD;
- ◊ Menyusun konsep naskah dinas bidang rumah tangga;
- ◊ Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang rumah tangga yang telah dilaksanakan;
- ◊ Melaporkan kegiatan bidang rumah tangga kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

### 3. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian ini mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah, serta humas, protokol dan publikasi.

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian persidangan dan perundang-undangan;
- b. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- c. Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- d. Memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah inisiatif;

- e. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengumpulkan bahan penyiapan draf rancangan peraturan daerah inisiatif;
- g. Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- h. Menyusun risalah rapat;
- i. Mengoordinasikan pembahasan rancangan peraturan daerah;
- j. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi draf inventaris masalah (DIM);
- k. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- l. Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- m. Menyelenggarakan publikasi;
- n. Menyelenggarakan keprotokolan; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

- 1) Kelompok Sub-substansi Kajian Perundang-Undangan, mempunyai uraian tugas:
  - ◊ Menyusun rencana kegiatan bidang kajian perundang-undangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Sekretariat DPRD;
  - ◊ Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
  - ◊ Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan
  - ◊ Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang kajian perundang-undangan;
  - ◊ Melakukan penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah;
  - ◊ Menyusun bahan pembahasan peraturan daerah;
  - ◊ Melaksanakan kajian perundang-undangan;
  - ◊ Menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
  - ◊ Menyusun bahan daftar inventarisir masalah (DIM);
  - ◊ Membuat konsep bahan penyiapan draf peraturan daerah inisiatif dan konsep bahan penyusunan naskah akademik;

- ◊ Melakukan penyusunan tata tertib DPRD;
  - ◊ Menyusun konsep naskah dinas bidang kajian perundang-undangan;
  - ◊ Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kajian perundang-undangan yang telah dilaksanakan;
  - ◊ Melaporkan kegiatan bidang kajian perundang-undangan kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.
- 2) Kelompok Sub-substansi Persidangan dan Risalah, mempunyai uraian tugas:
- ◊ Menyusun rencana kegiatan bidang persidangan dan risalah berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Sekretariat DPRD;
  - ◊ Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan;
  - ◊ Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
  - ◊ Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang persidangan dan risalah;
  - ◊ Merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
  - ◊ Menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
  - ◊ Memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
  - ◊ Menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
  - ◊ Menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja DPRD;
  - ◊ Menyusun konsep naskah dinas sub-substansi persidangan dan risalah;
  - ◊ Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang persidangan dan risalah yang telah dilaksanakan;
  - ◊ Melaporkan kegiatan bidang persidangan dan risalah kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
- 3) Kelompok Sub-substansi Humas, Protokol dan Publikasi, mempunyai uraian tugas:
- ◊ Menyusun rencana kegiatan bidang humas, protokol dan publikasi berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Sekretariat DPRD;
  - ◊ Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada

pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan;

- ◊ Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- ◊ Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
- ◊ Menyusun bahan komunikasi, publikasi dan dokumentasi DPRD serta penyelenggaraan hubungan masyarakat DPRD;
- ◊ Merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- ◊ Menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
- ◊ Merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;
- ◊ Merencanakan kegiatan DPRD;
- ◊ Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD;
- ◊ Melakukan penyusunan laporan kinerja DPRD;
- ◊ Memfasilitasi tugas pimpinan DPRD dan pelaksanaan tugas Badan Musyawarah;
- ◊ Menyusun konsep naskah dinas bidang hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
- ◊ Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang humas, protokol dan publikasi yang telah dilaksanakan;
- ◊ Melaporkan kegiatan bidang humas, protokol dan publikasi kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

#### 4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan, serta kerja sama dan aspirasi. Bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- b. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah prioritas dan plafon anggaran sementara/ kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan belanja daerah prioritas dan plafon

- anggaran sementara perubahan;
- c. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah/anggaran pendapatan belanja daerah perubahan;
  - d. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah;
  - e. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
  - f. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota;
  - g. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
  - h. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
  - i. Memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
  - j. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
  - k. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
  - l. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
  - m. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok pikiran DPRD;
  - n. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan persetujuan kerja sama daerah;
  - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Fasilitasi penganggaran dan pengawasan mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

- 1) Kelompok sub-substansi fasilitasi penganggaran, mempunyai tugas:
  - ◊ Menyusun rencana kegiatan bidang fasilitasi penganggaran berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Sekretariat DPRD;
  - ◊ Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada

- pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
  - ◊ Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
  - ◊ Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang fasilitasi penganggaran;
  - ◊ Merencanakan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
  - ◊ Menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP;
  - ◊ Menyusun bahan pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - ◊ Menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala daerah;
  - ◊ Menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
  - ◊ Menyusun konsep naskah dinas bidang fasilitasi penganggaran;
  - ◊ Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang fasilitasi penganggaran yang telah dilaksanakan;
  - ◊ Melaporkan kegiatan bidang fasilitasi penganggaran kepada Kepala bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan.
- 2) Kelompok Sub-substansi fasilitasi pengawasan, mempunyai tugas:
- ◊ Menyusun rencana kegiatan bidang fasilitasi pengawasan berdasarkan sasaran dan program kegiatan tahunan Sekretariat DPRD;
  - ◊ Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
  - ◊ Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
  - ◊ Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang fasilitasi pengawasan;
  - ◊ Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
  - ◊ Merancang bahan-bahan rapat internal DPRD;
  - ◊ Menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
  - ◊ Menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;

- ◊ Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan meliputi pengawasan urusan bidang pemerintahan dan hukum, infrastruktur kesejahteraan rakyat, perekonomian, sumber daya alam, pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan Keuangan oleh BPK, pengawasan penggunaan anggaran;
  - ◊ Melaksanakan penyusunan dan pengawasan kode etik DPRD;
  - ◊ Menyusun konsep naskah dinas bidang fasilitasi pengawasan;
  - ◊ Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan;
  - ◊ Melaporkan kegiatan bidang fasilitasi pengawasan kepada Kepala bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan.
- 3) Kelompok Sub-substansi Kerja Sama dan Aspirasi, mempunyai tugas:
- ◊ Menyusun rencana kegiatan bidang kerja sama dan aspirasi berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Sekretariat DPRD;
  - ◊ Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
  - ◊ Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
  - ◊ Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang kerjasama dan aspirasi;
  - ◊ Memfasilitasi pelaksanaan reses DPRD;
  - ◊ Merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan Pejabat pemerintah dan masyarakat;
  - ◊ Menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
  - ◊ Menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;
  - ◊ Melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD;
  - ◊ Melaksanakan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah;
  - ◊ Melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah;
  - ◊ Melaksanakan penyusunan bahan komunikasi dan publikasi;
  - ◊ Menyusun konsep naskah dinas bidang kerjasama dan aspirasi
  - ◊ Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kerjasama dan aspirasi yang telah dilaksanakan;

- ◇ Melaporkan kegiatan bidang kerjasama dan aspirasi kepada Kepala bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan.

## **Tata Kerja dan Pelaporan**

### 1) Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya seluruh pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.

- ◇ Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat DPRD wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya masing-masing.
- ◇ Sekretaris DPRD dan setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD wajib melaksanakan fungsi pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

### 2) Pelaporan

- ◇ Sekretaris DPRD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- ◇ Sekretaris DPRD wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- ◇ Setiap unsur Pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD wajib mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib melaporkan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ◇ Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan.

## Struktur Organisasi Sekretariat DPRD



## 2.2 Sumber daya Sekretariat DPRD Kota Singkawang

Sekretariat DPRD Kota Singkawang saat ini didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 25 orang, yang terdiri atas 18 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Dalam melaksanakan tugasnya, PNS tersebut dibantu oleh tenaga honorer sebanyak 20 orang.

Gambaran SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kota Singkawang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Pria	18 orang
2.	Wanita	7 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>25 orang</b>

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Pasca Sarjana / S3	-
2.	Pasca Sarjana / S2	2 orang
3.	Sarjana / S1	12 orang
4.	Sarjana Muda / D3	2 orang
5.	SLTA	9 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>25 orang</b>

**Tabel 2.2.3**  
**Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Menurut Golongan**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Golongan II	7 orang
2.	Golongan III	13 orang
3.	Golongan IV	5 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>25 orang</b>

**Tabel 2.2.4**  
**Pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjejanan**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Diklatpim II	-
2.	SPAMEN	-
3.	Diklatpim III/ Spama	4
4.	Diklatpim IV	4
5.	Adum / Adumla	-
	<b>Jumlah</b>	<b>8 orang</b>

**Tabel 2.2.5**  
**Pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan Jabatan Struktural**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Eselon II	1 orang
2.	Eselon III	3 orang
3.	Eselon IV	9 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>13 orang</b>

### **2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang.**

1. Kinerja yang dimaksudkan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dengan hasil kinerja yang baik.
2. Kinerja suatu lembaga tidak terlepas dari kinerja karyawannya, peningkatan kinerja juga sangat tergantung pada kemajuan, kesungguhan dan motivasi kerja pegawai sebagai aparatur daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Sekretariat DPRD Kota Singkawang merupakan salah satu unit kerja pendukung dan unit koordinator dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD serta penyediaan dan pengkordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD. Pelayanan yang diberikan masing-masing Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian sudah mengacu kepada tugas pokok dan fungsi.

**Tabel T-C.23.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**  
**Kota Singkawang**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Set-DPRD Tahun ke-					Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke-					Rasio Capaian Kinerja Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	<b>Prosentase kecukupan pelayanan perkantoran</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	112%	123%	124%	-	-	112%	123%	124%	-	-
1	Jumlah rekening listrik, telepon, air, fax yang dibayar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69%	70%	65%	-	-	69%	70%	65%	-	-
2	Jumlah STNK mobil operasional yang terbayar pajaknya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	26%	79%	82%	-	-	26%	79%	82%	-	-
3	2 bendahara, 3 pembantu dan 1 pemegang barang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	84%	106%	-	-	93%	84%	106%	-	-
4	35 jenis barang untuk pembersih kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	84%	82%	-	-	98%	84%	82%	-	-
5	64 item alat tulis kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	103%	92%	-	-	99%	103%	92%	-	-
6	Jumlah pencetakan jilid dan penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	82%	91%	-	-	97%	82%	91%	-	-
7	Jumlah titik lampu untuk penerangan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	102%	167%	-	-	98%	102%	167%	-	-
8	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	196%	291%	100%	-	-	196%	291%	100%	-	-
9	Bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	77%	201%	112%	-	-	77%	201%	112%	-	-
10	Makanan dan minuman harian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	90%	122%	-	-	88%	90%	122%	-	-
11	Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah bagi Pimpinan, Anggota DPRD dan Set-DPRD.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	135%	138%	166%	-	-	135%	138%	166%	-	-
12	Jumlah tenaga honorer pendukung administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	57%	71%	70%	-	-	57%	71%	70%	-	-
	<b>Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	311%	111%	-	-	95%	311%	111%	-	-

1	Pengadaan bangunan gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pemeliharaan taman kantor dan gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	217%	115%	-	-	100%	217%	115%	-
3	Jumlah sevice,suku cadang dan bahan bakar minyak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	66%	47%	-	-	96%	66%	47%	-
4	Jasa loundry dan pemeliharaan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	74%	104%	-	-	97%	74%	104%	-
5	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	74%	40%	72%	-	-	74%	40%	72%	-
6	Pemeliharaan mebeleur sarana kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	65%	59%	-	-	75%	65%	59%	-
7	Jumlah service, suku cadang dan bahan bakar minyak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	88%	24%	-	-	96%	88%	24%	-
	<b>Jumlah pakaian dinas beserta atributnya</b>	<b>100%</b>	<b>103%</b>	<b>96%</b>	<b>56%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>103%</b>	<b>96%</b>	<b>56%</b>	<b>-</b>								
1	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	103%	96%	56%	-	-	103%	96%	56%	-
	<b>Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas</b>	<b>100%</b>	<b>88%</b>	<b>89%</b>	<b>17%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88%</b>	<b>89%</b>	<b>17%</b>	<b>-</b>								
1	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	89%	17%	-	-	88%	89%	17%	-
	<b>Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>65%</b>	<b>101%</b>	<b>252%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65%</b>	<b>101%</b>	<b>252%</b>	<b>-</b>								
1	Data capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	81%	278%	1202%	-	-	81%	278%	1202%	-
2	Data keuangan akhir tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	45%	70%	181%	-	-	45%	70%	181%	-
3	Data akurat laporan kinerja tahunan OPD Set-DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84%	120%	129%	-	-	84%	120%	129%	-
4	Data Revisi Renstra OPD Set-DPRD 2018 - 2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79%	-	-	-	-	79%	-	-	-
5	Data LPPD dan LKPJ tahun 2017	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86%	112%	156%	-	-	86%	112%	156%	-
	<b>Prosentase keikutsertaan aparatur Set-DPRD dalam event daerah</b>	<b>100%</b>	<b>169%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>169%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>									
1	Kunjungan masyarakat pada stand Set-DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	169%	-	-	-	100%	169%	-	-

	<b>Prosentase kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah yang ditindaklanjuti</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87%	84%	55%	-	-	87%	84%	55%	-	-
1	Jumlah raperda yang akan ditetapkan menjadi perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	123%	104%	74%	-	-	123%	104%	74%	-	-
2	Jumlah dialog dengan masyarakat serta pejabat pemerintah yang dilaksanakan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	81%	34%	63%	-	-	81%	34%	63%	-	-
3	Jumlah rapat alat kelengkapan dewan yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	48%	70%	50%	-	-	48%	70%	50%	-	-
4	Jumlah rapat-rapat paripurna DPRD yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	252%	14%	-	-	83%	252%	14%	-	-
5	Jumlah pertemuan antara anggota DPRD dengan kontituennya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	57%	62%	-	-	94%	57%	62%	-	-
6	Jumlah Bimtek/Sosialisasi yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	69%	33%	-	-	50%	69%	33%	-	-
7	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	41%	94%	76%	-	-	41%	94%	76%	-	-
8	Pembelajaran tentang pengembangan daerah melalui kunker	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84%	89%	55%	-	-	84%	89%	55%	-	-
9	Kegiatan Anggota DPRD yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	General check up yang terlayani bagi Anggota DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	24%	31%	23%	-	-	24%	31%	23%	-	-
	<b>Prosentase terhadap penataan peraturan perundang-undangan</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Jumlah perda/peraturan kepala daerah yang dikaji terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang baru	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Jumlah peserta yang mengikuti rakernas Apeksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Prosentase adanya evaluasi terhadap jabatan di SKPD</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	-	65%	-	-	90%	-	65%	-	-
1	Jumlah jabatan pada Set-DPRD yang terevaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	-	65%	-	-	90%	-	65%	-	-

	<b>Prosentase pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>57%</b>	<b>59%</b>	<b>131%</b>	-	-	<b>57%</b>	<b>59%</b>	<b>131%</b>	-	-							
1	Data barang milik daerah yang akurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	47%	74%	-	-	67%	47%	74%	-	-
2	Data barang milik daerah yang terinventarisir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	51%	-	-	-	-	51%	-	-
3	Anggaran Set.DPRD yang terakomodir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	69%	143%	-	-	50%	69%	143%	-	-
4	Jumlah SPM yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	62%	146%	-	-	75%	62%	146%	-	-
	<b>Prosentase laporan pertanggungjawaban keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>42%</b>	<b>48%</b>	<b>148%</b>	-	-	<b>42%</b>	<b>48%</b>	<b>148%</b>	-	-							
1	Data pertanggungjawaban keuangan yang akurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	42%	48%	148%	-	-	42%	48%	148%	-	-
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	87,24%	-	-	-	-	87,24%	-
1	<b>Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	80,42%	-	-	-	-	80,42%	-
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	30,13%	-	-	-	-	30,13%	-
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	30,82%	-	-	-	-	30,82%	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	27,54%	-	-	-	-	27,54%	-
2	<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	87,52%	-	-	-	-	87,52%	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	87,42%	-	-	-	-	87,42%	-
	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	89,12%	-	-	-	-	89,12%	-
	Penyusunan Akutansi dan Pelaporan Keuangan	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	97,36%	-	-	-	-	97,36%	-
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	99,34%	-	-	-	-	99,34%	-
	Penyusunan laporan kinerja capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	98,71%	-	-	-	-	98,71%	-
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	98,12%	-	-	-	-	98,12%	-
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	93,77%	-	-	-	-	93,77%	-
3	<b>Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	88,72%	-	-	-	-	88,72%	-

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air,Listrik dan gas elpiji.	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	73,52%	-	-	-	-	73,52%	-
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	83,71%	-	-	-	-	83,71%	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	65,45%	-	-	-	-	65,45%	-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	95,11%	-	-	-	-	95,11%	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	96,43%	-	-	-	-	96,43%	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	80,90%	-	-	-	-	80,90%	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	91,18%	-	-	-	-	91,18%	-
Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Mobil Jabatan	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Mebeleur	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	68,75%	-	-	-	-	68,75%	-
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	69,75%	-	-	-	-	69,75%	-

	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	68,75%	-	-	-	-	68,75%	-
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	<b>Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>47,29%</b>	-	-	-	-	<b>47,29%</b>	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	-
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Korpri	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	13,71%	-	-	-	-	13,71%	-
2	<b>Program Layanan Dan Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>25%</b>	-	-	-	-	<b>25%</b>	-
1	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>51,36%</b>	-	-	-	-	<b>51,36%</b>	-
	Fasilitasi Rapat DPRD	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	51,36%	-	-	-	-	51,36%	-
2	<b>Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>89,89%</b>	-	-	-	-	<b>89,89%</b>	-
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	65,45%	-	-	-	-	65,45%	-
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	98,81%	-	-	-	-	98,81%	-
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	45,75%	-	-	-	-	45,75%	-
3	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>74,73%</b>	-	-	-	-	<b>74,73%</b>	-
1	<b>Pembentukan Perda Dan Peraturan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>58,87%</b>	-	-	-	-	<b>58,87%</b>	-
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	37,25%	-	-	-	-	37,25%	-
	Pembahasan Rancangan Perda	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	67,86%	-	-	-	-	67,86%	-

	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>74,30%</b>	-	-	-	-	<b>74,30%</b>	-
	Pembahasan KUA dan PPAS	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	88,39%	-	-	-	-	88,39%	-
	Pembahasan KUPA dan PPAS	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	73,85%	-	-	-	-	73,85%	-
	Pembahasan APBD	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	66,44%	-	-	-	-	66,44%	-
	Pembahasan APBD Perubahan	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	70,07%	-	-	-	-	70,07%	-
	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	61,05%	-	-	-	-	61,05%	-
<b>3</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>78,72%</b>	-	-	-	-	<b>78,72%</b>	-
	Bimbingan Teknis DPRD	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	71,39%	-	-	-	-	71,39%	-
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan tenaga ahli fraksi	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	93,72%	-	-	-	-	93,72%	-
	Penyusunan Program Kerja DPRD	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	56,68%	-	-	-	-	56,68%	-
<b>4</b>	<b>Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>90,94%</b>	-	-	-	-	<b>90,94%</b>	-
	Pelaksanaan Reses	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	90,94%	-	-	-	-	90,94%	-
<b>5</b>	<b>Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>76,58%</b>	-	-	-	-	<b>76,58%</b>	-
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	76,58%	-	-	-	-	76,58%	-

**Tabel T-C.24.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD**  
**Kota Singkawang**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Anggaran dan Realisasi Tahun Ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN</b>	3.231.895.840	3.262.680.000	3.300.900.000	3.339.850.000	3.379.740.000	3.610.671.268	4.000.445.088	4.078.731.254	-	-	112%	123%	124%	-	-	3.303.013.168	3.896.615.870
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	289.380.000	289.380.000	289.380.000	292.273.800	295.196.538	200.928.110	203.601.284	187.939.952	-	-	69%	70%	65%	-	-	291.122.068	197.489.782
Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.110.000	11.221.100	2.819.900	8.701.200	9.069.925	-	-	26%	79%	82%	-	-	11.066.220	6.863.675
Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Keuangan	84.080.000	84.080.000	84.920.800	85.770.008	86.627.708	78.075.000	70.550.000	90.237.500	-	-	93%	84%	106%	-	-	85.095.703	79.620.833
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	35.888.250	35.888.250	35.888.250	36.247.133	36.609.604	35.280.000	30.191.000	29.579.300	-	-	98%	84%	82%	-	-	36.104.297	31.683.433
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	74.040.600	74.040.600	74.040.600	74.781.008	75.528.816	72.967.200	76.159.200	68.255.150	-	-	99%	103%	92%	-	-	74.486.325	72.460.517
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	130.989.750	130.989.750	130.989.750	132.299.648	133.622.644	127.264.750	107.773.500	119.801.200	-	-	97%	82%	91%	-	-	131.778.308	118.279.817
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.138.900	23.138.900	23.138.900	23.370.289	23.603.992	22.676.000	23.704.000	38.583.950	-	-	98%	102%	167%	-	-	23.278.196	28.321.317
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	211.115.000	211.115.000	213.226.150	213.358.412	217.511.996	413.148.000	614.639.865	213.752.300	-	-	196%	291%	100%	-	-	213.265.312	413.846.722
Kegiatan Penyediaan Bahan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	84.080.000	84.080.000	84.080.000	84.920.800	85.770.008	64.415.000	168.985.000	94.034.400	-	-	77%	201%	112%	-	-	84.586.162	109.144.800
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	152.300.000	152.300.000	153.823.000	155.361.230	156.914.842	133.975.000	137.390.000	187.338.500	-	-	88%	90%	122%	-	-	154.139.814	152.901.167
Rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah	1.492.529.980	1.523.314.140	1.557.059.190	1.578.570.782	1.600.847.990	2.011.517.200	2.102.939.498	2.588.563.512	-	-	135%	138%	166%	-	-	1.550.464.416	2.234.340.070
Kegiatan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis	643.353.360	643.353.360	643.353.360	649.786.894	656.284.763	369.325.108	455.810.541	451.575.565	-	-	57%	71%	70%	-	-	647.226.347	425.570.405
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	304.560.000	310.650.000	316.870.000	323.210.000	329.680.000	288.750.730	967.056.602	350.647.040	-	-	95%	311%	111%	-	-	316.994.000	535.484.791

Pembangunan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	32.200.000	33.210.000	33.874.200	34.554.284	35.245.370	32.160.000	72.069.992	39.006.300	-	-	100%	217%	115%	-	-	33.816.771	47.745.431
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	68.000.000	70.040.000	71.440.800	72.869.616	74.327.008	65.471.230	46.512.110	33.681.740	-	-	96%	66%	47%	-	-	71.335.485	48.555.027
Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	25.350.000	25.350.000	25.857.000	26.374.140	26.901.623	24.540.000	18.778.300	26.984.900	-	-	97%	74%	104%	-	-	25.966.553	23.434.400
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	22.960.000	22.960.000	23.419.200	23.887.584	24.365.336	16.995.000	9.093.000	16.913.100	-	-	74%	40%	72%	-	-	23.518.424	14.333.700
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	4.050.000	4.050.000	4.131.000	4.213.620	4.297.892	3.050.000	2.635.000	2.436.000	-	-	75%	65%	59%	-	-	4.148.502	2.707.000
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	152.000.000	155.040.000	158.147.800	161.310.756	164.542.771	146.534.500	136.968.200	38.695.000	-	-	96%	88%	24%	-	-	158.208.265	107.399.233
<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>378.000.000</b>	<b>381.780.000</b>	<b>385.600.000</b>	<b>389.460.000</b>	<b>393.350.000</b>	<b>389.160.000</b>	<b>365.570.000</b>	<b>215.100.000</b>	-	-	<b>103%</b>	<b>96%</b>	<b>56%</b>	-	-	<b>385.638.000</b>	<b>323.276.667</b>
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	378.000.000	381.780.000	385.600.000	389.460.000	393.350.000	389.160.000	365.570.000	215.100.000	-	-	103%	96%	56%	-	-	385.638.000	323.276.667
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>297.285.000</b>	<b>300.260.000</b>	<b>303.260.000</b>	<b>306.290.000</b>	<b>309.350.000</b>	<b>263.096.600</b>	<b>268.320.600</b>	<b>51.606.000</b>	-	-	<b>88%</b>	<b>89%</b>	<b>17%</b>	-	-	<b>303.289.000</b>	<b>194.341.067</b>
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	297.285.000	300.260.000	303.260.000	306.290.000	309.350.000	263.096.600	268.320.600	51.606.000	-	-	88%	89%	17%	-	-	303.289.000	194.341.067
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>44.574.825</b>	<b>21.570.000</b>	<b>21.800.000</b>	<b>23.030.000</b>	<b>23.270.000</b>	<b>28.783.250</b>	<b>21.702.000</b>	<b>55.021.800</b>	-	-	<b>65%</b>	<b>101%</b>	<b>252%</b>	-	-	<b>26.848.965</b>	<b>35.169.017</b>
Penyusunan laporan kinerja capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.901.350	1.566.175	1.796.175	2.025.984	2.046.244	4.777.000	4.355.000	21.587.400	-	-	81%	278%	1202%	-	-	2.667.186	10.239.800
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	21.663.150	12.663.150	12.663.150	13.296.308	13.429.271	9.840.000	8.861.000	22.937.700	-	-	45%	70%	181%	-	-	14.743.006	13.879.567
Penyusunan LAKIP SKPD	5.511.925	3.511.925	3.511.925	3.687.521	3.724.396	4.656.750	4.201.000	4.541.700	-	-	84%	120%	129%	-	-	3.989.538	4.466.483
Penyusunan Revisi Renstra SKPD	5.669.650	-	-	-	-	4.489.500	-	-	-	-	79%	-	-	-	-	5.669.650	4.489.500

Penyusunan LPPD /LKPJ	5.828.750	3.828.750	3.828.750	4.020.188	4.070.089	5.020.000	4.285.000	5.955.000	-	-	86%	112%	156%	-	-	18.320.456	5.086.667
<b>PROGRAM Penguatan TRANSPARANSI PUBLIK</b>	<b>24.000.000</b>	<b>20.100.000</b>	<b>20.200.000</b>	<b>20.500.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>34.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>169%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.960.000</b>	<b>29.000.000</b>
Kegiatan Expo Kinerja SKPD	24.000.000	20.100.000	20.200.000	20.500.000	25.000.000	24.000.000	34.000.000	-	-	-	100%	169%	-	-	-	21.960.000	29.000.000
<b>PROGRAM Peningkatan Kapasitas LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	<b>6.657.744.205</b>	<b>6.741.510.000</b>	<b>6.725.580.000</b>	<b>6.709.940.000</b>	<b>6.744.590.000</b>	<b>5.804.780.847</b>	<b>5.648.245.448</b>	<b>3.696.433.664</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87%</b>	<b>84%</b>	<b>55%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.715.872.841</b>	<b>5.049.819.986</b>
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.353.535.605	2.437.301.400	2.421.371.400	2.423.731.400	2.458.381.400	2.904.171.281	2.536.758.150	1.801.253.054	-	-	123%	104%	74%	-	-	2.418.864.241	2.414.060.828
Hearing/Dialog&Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama	40.452.400	40.452.400	40.452.400	38.452.400	38.452.400	32.902.400	13.864.050	25.372.500	-	-	81%	34%	63%	-	-	39.652.400	24.046.317
Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	61.903.700	61.903.700	61.903.700	59.903.700	59.903.700	29.840.500	43.404.500	31.105.200	-	-	48%	70%	50%	-	-	61.103.700	34.783.400
Rapat-rapat Paripurna	99.046.050	99.046.050	99.046.050	97.046.050	97.046.050	82.347.400	249.608.650	13.854.500	-	-	83%	252%	14%	-	-	98.246.050	115.270.183
Kegiatan Reses	918.947.450	918.947.450	918.947.450	916.947.450	916.947.450	866.243.900	524.743.400	567.121.300	-	-	94%	57%	62%	-	-	918.147.450	652.702.867
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1.712.784.000	1.712.784.000	1.712.784.000	1.710.784.000	1.710.784.000	863.075.988	1.180.120.155	568.477.615	-	-	50%	69%	33%	-	-	1.711.984.000	870.557.919
Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat	16.075.000	16.075.000	16.075.000	14.075.000	14.075.000	6.650.000	15.104.500	12.197.500	-	-	41%	94%	76%	-	-	15.275.000	11.317.333
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah	1.197.000.000	1.197.000.000	1.197.000.000	1.195.000.000	1.195.000.000	1.002.854.378	1.063.597.043	661.496.995	-	-	84%	89%	55%	-	-	1.196.200.000	909.316.139
Pelayanan Kegiatan Anggota DPRD	189.000.000	189.000.000	189.000.000	187.000.000	187.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.200.000	-
General Check Up Anggota DPRD	69.000.000	69.000.000	69.000.000	67.000.000	67.000.000	16.695.000	21.045.000	15.555.000	-	-	24%	31%	23%	-	-	68.200.000	17.765.000
<b>PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220.000.000</b>	<b>-</b>
Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang- Undangan yang baru, lebih tinggi dan keseserasian antar peraturan perundang- undangan Daerah	200.000.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000	-

<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH</b>	9.000.000	9.180.000	9.360.000	9.550.000	9.740.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.366.000	-
Rakernas Apeksi dan Raker Komwil V Apeksi Se Kalimantan	9.000.000	9.180.000	9.360.000	9.550.000	9.740.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.366.000	-
<b>PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI</b>	4.552.400	7.000.000	7.250.000	7.500.000	7.500.000	4.081.000	-	4.734.150	-	-	90%	-	65%	-	-	6.760.480	4.407.575
Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang	4.552.400	7.000.000	7.250.000	7.500.000	7.500.000	4.081.000	-	4.734.150	-	-	90%	-	65%	-	-	6.760.480	4.407.575
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	47.705.875	48.670.000	49.640.000	50.620.000	51.620.000	26.959.500	28.676.600	65.023.100	-	-	57%	59%	131%	-	-	49.651.175	40.219.733
Penatausahaan Barang Milik Daerah	3.995.900	4.085.825	4.167.542	4.250.892	4.314.656	2.676.000	1.922.100	3.100.000	-	-	67%	47%	74%	-	-	4.162.963	2.566.033
Inventarisasi Barang Milik Daerah	3.995.900	4.075.818	4.153.935	4.237.013	4.300.569	-	-	2.110.000	-	-	-	-	51%	-	-	4.152.647	2.110.000
Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD	22.272.425	22.717.874	23.172.231	23.635.676	24.108.389	11.122.500	15.784.800	33.248.700	-	-	50%	69%	143%	-	-	23.181.319	20.052.000
Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	17.441.650	17.790.483	18.146.293	18.496.419	18.896.386	13.161.000	10.969.700	26.564.400	-	-	75%	62%	146%	-	-	18.154.246	16.898.367
<b>PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	11.171.300	11.390.000	11.620.000	11.850.000	12.090.000	4.733.000	5.425.000	17.153.900	-	-	42%	48%	148%	-	-	11.624.260	9.103.967
Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan	11.171.300	11.390.000	11.620.000	11.850.000	12.090.000	4.733.000	5.425.000	17.153.900	-	-	42%	48%	148%	-	-	11.624.260	9.103.967
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	-	28.448.327.823	28.732.811.101	-	-	-	20.358.853.185	-	-	-	-	87,24%	-	28.590.569.462	-
<b>Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	-	-	-	52.419.600	52.943.796	-	-	-	35.099.830	-	-	-	-	80,42%	-	52.681.698	-
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	-	-	-	8.419.600	8.503.796	-	-	-	11.497.940	-	-	-	-	30,13%	-	8.461.698	-
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	-	-	-	10.000.000	10.100.000	-	-	-	20.847.490	-	-	-	-	30,82%	-	10.050.000	-

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	34.000.000	34.340.000	-	-	-	2.754.400	-	-	-	-	27,54%	-	34.170.000	-
<b>Administrasi Keuangan</b>	-	-	-	<b>20.977.853.579</b>	<b>21.187.632.115</b>	-	-	-	<b>17.987.573.478</b>	-	-	-	-	<b>87,52%</b>	-	<b>21.082.742.847</b>	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	20.815.438.979	21.023.593.369	-	-	-	17.747.013.973	-	-	-	-	87,42%	-	20.919.516.174	-
Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	-	-	-	42.000.000	42.420.000	-	-	-	125.370.000	-	-	-	-	89,12%	-	42.210.000	-
Penyusunan Akutansi dan Pelaporan Keuangan	-	-	-	31.000.000	31.310.000	-	-	-	38.855.975	-	-	-	-	97,36%	-	31.155.000	-
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	5.000.000	5.050.000	-	-	-	23.350.800	-	-	-	-	99,34%	-	5.025.000	-
Penyusunan laporan kinerja capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	-	26.916.900	27.186.069	-	-	-	27.001.765	-	-	-	-	98,71%	-	27.051.485	-
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	22.497.700	22.722.677	-	-	-	8.483.090	-	-	-	-	98,12%	-	22.610.189	-
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	-	-	35.000.000	35.350.000	-	-	-	17.497.875	-	-	-	-	93,77%	-	35.175.000	-
<b>Administrasi Umum</b>	-	-	-	<b>6.929.544.644</b>	<b>6.998.840.090</b>	-	-	-	<b>437.295.700</b>	-	-	-	-	<b>88,72%</b>	-	<b>6.964.192.367</b>	-
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air,Listrik dan gas elpiji.	-	-	-	285.380.000	288.233.800	-	-	-	188.637.764	-	-	-	-	73,52%	-	286.806.900	-
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	-	-	-	85.000.000	85.850.000	-	-	-	50.158.400	-	-	-	-	83,71%	-	85.425.000	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	20.000.000	20.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.100.000	-
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	-	-	87.000.000	87.870.000	-	-	-	7.854.000	-	-	-	-	65,45%	-	87.435.000	-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	70.477.075	71.181.846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.829.461	-
Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	-	81.444.660	82.259.107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.851.884	-

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	144.088.725	145.529.612	-	-	-	69.757.900	-	-	-	-	95,11%	-	144.809.169	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	134.664.000	136.010.640	-	-	-	30.227.000	-	-	-	-	96,43%	-	135.337.320	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	266.025.000	268.685.250	-	-	-	179.255.000	-	-	-	-	80,90%	-	267.355.125	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	71.215.584	71.927.740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.571.662	-
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	97.080.000	98.050.800	-	-	-	75.720.000	-	-	-	-	91,18%	-	97.565.400	-
Penyediaan Makanan dan Minuman	-	-	-	367.530.000	371.205.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369.367.650	-
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	-	-	-	3.166.820.000	3.198.488.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.182.654.100	-
Pengadaan Mobil Jabatan	-	-	-	951.834.000	961.352.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956.593.170	-
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	167.334.000	169.007.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.170.670	-
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	-	-	-	113.187.500	114.319.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.753.438	-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	100.000.000	101.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.500.000	-
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	-	-	-	198.505.400	200.490.454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.497.927	-
Pengadaan Mebeleur	-	-	-	106.503.700	107.568.737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.036.219	-
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	-	-	-	50.000.000	50.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.250.000	-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	-	40.555.000	40.960.550	-	-	-	20.006.350	-	-	-	-	68,75%	-	40.757.775	-
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	-	-	-	157.300.000	158.873.000	-	-	-	73.038.001	-	-	-	-	69,75%	-	158.086.500	-

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	-	-	74.800.000	75.548.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.174.000	-
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	-	-	30.745.000	31.052.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.898.725	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan	-	-	-	30.000.000	30.300.000	-	-	-	20.006.350	-	-	-	-	68,75%	-	30.150.000	-
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-	-	27.600.000	27.876.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.738.000	-
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	-	-	-	4.455.000	4.499.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.477.275	-
<b>Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	-	-	-	<b>488.510.000</b>	<b>493.395.100</b>	-	-	-	<b>46.451.200</b>	-	-	-	-	<b>47,29%</b>	-	<b>490.952.550</b>	-
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	-	-	-	35.750.000	36.107.500	-	-	-	23.296.000	-	-	-	-	100,00 %	-	35.928.750	-
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	-	-	-	19.250.000	19.442.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.346.250	-
Pengadaan Pakaian Korpri	-	-	-	10.500.000	10.605.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.552.500	-
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	-	-	-	19.250.000	19.442.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.346.250	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	403.760.000	407.797.600	-	-	-	23.155.200	-	-	-	-	13,71%	-	405.778.800	-
<b>Program Layanan Dan Administrasi Keuangan</b>	-	-	-	<b>913.807.400</b>	<b>922.945.474</b>	-	-	-	<b>224.948.600</b>	-	-	-	-	<b>25%</b>	-	<b>918.376.437</b>	-
<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	-	-	-	<b>353.807.400</b>	<b>357.345.474</b>	-	-	-	<b>24.089.600</b>	-	-	-	-	<b>51,36%</b>	-	<b>355.576.437</b>	-
Fasilitasi Rapat DPRD	-	-	-	353.807.400	357.345.474	-	-	-	24.089.600	-	-	-	-	51,36%	-	355.576.437	-
<b>Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD</b>	-	-	-	<b>560.000.000</b>	<b>565.600.000</b>	-	-	-	<b>200.859.000</b>	-	-	-	-	<b>89,89%</b>	-	<b>562.800.000</b>	-
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	-	-	-	12.000.000	12.120.000	-	-	-	7.854.000	-	-	-	-	65,45%	-	12.060.000	-

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	-	-	-	518.000.000	523.180.000	-	-	-	179.280.000	-	-	-	-	98,81%	-	520.590.000	-
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	-	-	-	30.000.000	30.300.000	-	-	-	13.725.000	-	-	-	-	45,75%	-	30.150.000	-
<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</b>	-	-	-	<b>9.746.752.704</b>	<b>9.844.220.231</b>	-	-	-	<b>5.090.927.200</b>	-	-	-	-	<b>74,73%</b>	-	<b>9.795.486.468</b>	-
<b>Pembentukan Perda Dan Peraturan DPRD</b>	-	-	-	<b>2.971.808.369</b>	<b>3.001.526.453</b>	-	-	-	<b>827.115.953</b>	-	-	-	-	<b>58,87%</b>	-	<b>2.986.667.411</b>	-
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-	-	-	100.000.000	101.000.000	-	-	-	31.820.500	-	-	-	-	37,25%	-	100.500.000	-
Pembahasan Rancangan Perda	-	-	-	2.381.808.369	2.405.626.453	-	-	-	795.295.453	-	-	-	-	67,86%	-	2.393.717.411	-
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	-	-	-	210.000.000	212.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.050.000	-
Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	-	-	-	280.000.000	282.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281.400.000	-
<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	-	-	-	<b>2.243.508.000</b>	<b>2.265.943.080</b>	-	-	-	<b>759.246.186</b>	-	-	-	-	<b>74,30%</b>	-	<b>2.254.725.540</b>	-
Pembahasan KUA dan PPAS	-	-	-	781.252.000	789.064.520	-	-	-	83.953.490	-	-	-	-	88,39%	-	785.158.260	-
Pembahasan KUPA dan PPAS	-	-	-	281.000.000	283.810.000	-	-	-	65.339.500	-	-	-	-	73,85%	-	282.405.000	-
Pembahasan APBD	-	-	-	393.752.000	397.689.520	-	-	-	294.638.796	-	-	-	-	66,44%	-	395.720.760	-
Pembahasan APBD Perubahan	-	-	-	393.752.000	397.689.520	-	-	-	127.847.600	-	-	-	-	70,07%	-	395.720.760	-
Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	-	-	-	393.752.000	397.689.520	-	-	-	187.466.800	-	-	-	-	61,05%	-	395.720.760	-
<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	-	-	-	<b>2.020.594.140</b>	<b>2.040.800.081</b>	-	-	-	<b>604.019.445</b>	-	-	-	-	<b>78,72%</b>	-	<b>2.030.697.111</b>	-
Bimbingan Teknis DPRD	-	-	-	1.661.414.000	1.678.028.140	-	-	-	573.303.945	-	-	-	-	71,39%	-	1.669.721.070	-

Publikasi dan Dokumentasi Dewan	-	-	-	95.000.000	95.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.475.000	-
Penyediaan tenaga ahli fraksi	-	-	-	189.000.000	190.890.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.945.000	-
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	-	-	-	62.180.140	62.801.941	-	-	-	27.008.000	-	-	-	-	93,72%	-	62.491.041	-
Penyusunan Program Kerja DPRD	-	-	-	13.000.000	13.130.000	-	-	-	3.707.500	-	-	-	-	56,68%	-	13.065.000	-
<b>Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	-	-	-	<b>1.010.842.195</b>	<b>1.020.950.617</b>	-	-	-	<b>643.290.400</b>	-	-	-	-	<b>90,94%</b>	-	<b>1.015.896.406</b>	-
Pelaksanaan Reses	-	-	-	1.010.842.195	1.020.950.617	-	-	-	643.290.400	-	-	-	-	90,94%	-	1.015.896.406	-
<b>Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</b>	-	-	-	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.515.000.000</b>	-	-	-	<b>2.093.779.692</b>	-	-	-	-	<b>76,58%</b>	-	<b>1.507.500.000</b>	-
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-	-	-	1.500.000.000	1.515.000.000	-	-	-	2.093.779.692	-	-	-	-	76,58%	-	1.507.500.000	-

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang**

Tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Singkawang dalam mencapai sasaran yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang pada kenyataannya belum terakomodir dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4).
2. Adanya regulasi terkait kedudukan Sekretariat DPRD yang secara administrasi bertanggungjawab kepada Walikota Singkawang melalui Sekretaris Daerah dan secara operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan.
3. Dinamika kegiatan Dewan.
4. Profesionalitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.

Peluang yang dapat mendukung Sekretariat DPRD Kota Singkawang dalam mencapai sasaran yang diharapkan antara lain sebagai berikut :

1. Adanya peluang pembahasan perubahan Aturan yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang.
2. Adanya SDM yang mampu menjembatani fungsi dan Tugas Eksekutif dan Legislatif.
3. Adanya ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan.
4. Adanya upaya peningkatan kapasitas SDM.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang dilakukan dengan memperhatikan analisis lingkungan dan asumsi yang terkait dengan faktor-faktor internal dan eksternal.

### **1. Faktor Penghambat**

Faktor Internal : Merupakan ketidakmampuan dari internal organisasi sehingga belum berhasil mencapai tujuan.

Faktor Internal yang ditemui antara lain :

- a. Masih ada pegawai yang belum memahami tupoksi dengan baik - Kuantitas dan kualitas SDM yang belum sesuai kebutuhan.

- b. Tingkat kedisiplinan yang masih perlu ditingkatkan
- Faktor Eksternal Merupakan faktor eksternal yang bersifat negatif dan menyebabkan organisasi belum berhasil mencapai tujuan.

Faktor eksternal yang ditemui antara lain :

- a. Adanya volume kegiatan rapat-rapat DPRD yang tinggi dan padat.
- b. Adanya kegiatan DPRD yang dilaksanakan di luar jam kerja.
- c. Adanya tuntutan akan fasilitasi terhadap agenda kegiatan DPRD yang tepat dan cepat.

## 2. Faktor Pendorong

Faktor Internal Merupakan situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan.

Adapun yang menjadi faktor pendorong antara lain :

- a. Tersedianya sarana kerja.
- b. Tersedianya anggaran/ dana.
- c. Adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dan atau bimbingan teknis.
- d. Adanya struktur kelembagaan yang jelas

Faktor Eksternal Merupakan faktor eksternal yang bersifat positif yang membantu organisasi dalam mencapai sasaran.

Adapun faktor yang mendorong Sekretariat DPRD Kota Singkawang dalam mencapai sasaran antara lain :

- a. Adanya komitmen dan upaya pembinaan pegawai untuk meningkatkan disiplin.
- b. Adanya hubungan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- c. Adanya hubungan kerja yang baik antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD**  
**KOTA SINGKAWANG**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD.**

Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat yang membantu tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD, tugas Sekretariat DPRD Kota Singkawang dituntut semakin cepat, tepat serta mampu melaksanakan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), serta berupa Lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threat).

Identifikasi terhadap lingkungan Strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang menghasilkan faktor-faktor Strategis sebagai berikut:

A. Faktor Internal

1. Kekuatan :

- a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup.
- b. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- c. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup.
- e. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan

ditetapkannya Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Kelemahan :

- a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- c. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

B. Faktor Eksternal

1. Peluang :

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD
- b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis.
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
- d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti kemampuan sumber daya aparatur.
- e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

2. Ancaman / Tantangan :

- a. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
- b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak external dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD.
- c. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

C. Pilihan Langkah Strategis

Langkah Strategis S-O

- a. Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi

melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran, sarana dan prasarana yang tersedia serta pemanfaatan perkembangan iptek dan tenaga ahli.

- b. Manfaatkan hubungan harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD, dan adanya tata tertib DPRD untuk mewujudkan pelayanan terhadap Anggota DPRD serta penyaluran aspirasi masyarakat secara prima.

Langkah Strategis S-T.

1. Jadikan keberadaan Tata Tertib serta terjalinnya hubungan yang harmoni antara Sekretariat DPRD dengan DPRD sebagai wahana untuk mengatasi mengatasi masih seringnya campur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untuk perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.
2. Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang Strategis untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan baik secara regional dan nasional.

Langkah Strategis W-O

1. Tingkatkan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

Langkah Strategis S-W

1. Tingkatkan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya.
2. Optimalkan ketersediaan pemanfaatan sarana dan prasarana pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

D. Faktor-faktor kunci keberhasilan.

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan factor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran organisasi, bahkan perumusan tujuan organisasi

dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan factor-faktor kunci keberhasilan tersebut.

Kunci keberhasilan ini ditetapkan terlebih dahulu dengan menganalisis lingkungan Strategis Organisasi melalui pendekatan analisis SWOT/TOWS. Dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT/TOWS, terhadap faktor-faktor tersebut maka dapat ditetapkan factor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

### **3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPRD Provinsi**

Sehubungan dengan Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang tidak berkaitan langsung dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, maka tidak terdapat faktor-faktor hambatan dalam pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang.

### **3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Singkawang yang dapat dijadikan acuan antara lain gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang. Sekretariat DPRD Kota Singkawang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Fungsi DPRD yaitu sebagai lembaga legislasi, anggaran dan, pengawasan. Adapun tugas dan wewenang DPRD antara lain :

- Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.

- Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
- Untuk DPRD kota, mengusulkan pengangkatan/pemberhentian Wali Kota/Wakil Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- Memilih wakil kepala daerah (Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian diatas guna menunjang kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya maka peran Sekretariat DPRD sangatlah penting sebagai lembaga yang bertugas memfasilitasi semua kegiatan anggota DPRD sehingga kinerja yang dihasilkan benar-benar optimal. Dengan memberikan fasilitasi pelayanan yang prima sehingga semua pihak yang berkepentingan terhadap Pembangunan Daerah Kota Singkawang memperoleh kepuasan atas pelayan yang telah diberikan. Di dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan prima tentunya tidak lepas dari adanya hambatan maupun tantangan yang terjadi saat ini, namun berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pembenahan pada lembaga tersebut.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD hanya ditinjau dari gambaran pelayan OPD yang merupakan faktor-faktor kunci

keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD berdasarkan identifikasi selama pelaksanaan tugas pada Sekretariat DPRD, yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
2. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Singkawang**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Tujuan dari Sekretariat DPRD adalah, *“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”*. Dengan indikator tujuan yaitu, *“Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD”*.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya targetnya masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah, *“Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD”*. Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Singkawang secara lebih ringkas dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel T-C.25.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD**  
**Kota Singkawang**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR / TUJUAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah</i>	<i>Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD</i>	<i>Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD</i>	90%	91%	92%	93%

**BAB V**  
**STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan arah kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah.

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana acara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Hal ini penting untuk mendapatkan tolak ukur utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut bisa terwujud/berhasil. Melalui tolak ukur tersebut, dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi/cara sekaligus untuk menentukan kebijakan yang merupakan kumpulan keputusan-keputusan.

**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	
<i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</i>	<i>Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD</i>	<i>Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik secara konsisten</i>	1	<i>Penguatan kolaborasi berbagi pihak penyelenggaraan pemerintah</i>
			2	<i>Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kinerja aparatur</i>
			3	<i>Penyusunan perencanaan yang berkualitas dan partisipatif serta tepat waktu</i>
			4	<i>Peningkatan kualitas kinerja melalui e-Gov</i>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Singkawang. Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD dalam kurun waktu tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efektif dan efisien pencapaian sasaran dimaksud. Untuk mengukur kinerja maka indikator kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang

diharapkan

3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran, maka Sekretariat DPRD Kota Singkawang menetapkan program, indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut berisi outcome maupun impact program.

Secara garis besar program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023-2026 adalah sebagai berikut (tabel terlampir )

**Tabel T-C.27.**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat DPRD**  
**Kota Singkawang**

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode REVISI RENSTRA OPD	Unit kerja perang kat daerah penang gung jawab
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator			Tar get	Rp								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD			Baik		Baik		Baik		Baik			Set-DPRD
				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>25.153.790.468</b>	<b>100 %</b>	<b>28.058.000.210</b>	<b>100 %</b>	<b>25.659.381.632</b>	<b>100 %</b>	<b>25.915.975.431</b>		
				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>133.387.771</b>	<b>100 %</b>	<b>134.721.648</b>	<b>100 %</b>	<b>136.068.864</b>	<b>100 %</b>	<b>137.429.549</b>		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.473.295	2 Dokumen	9.568.028	2 Dokumen	9.663.708	2 Dokumen	9.760.345		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.928.619	1 Dokumen	26.187.905	1 Dokumen	26.449.784	1 Dokumen	26.714.281		

				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.878.619	1 Dokumen	21.087.405	1 Dokumen	21.298.279	1 Dokumen	21.511.261		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.928.619	1 Dokumen	26.187.905	1 Dokumen	26.449.784	1 Dokumen	26.714.281		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20.878.619	1 Dokumen	21.087.405	1 Dokumen	21.298.279	1 Dokumen	21.511.261		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	20.200.000	4 Laporan	20.402.000	4 Laporan	20.606.020	4 Laporan	20.812.080		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.100.000	4 Laporan	10.201.000	4 Laporan	10.303.010	4 Laporan	10.406.040		
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tersusun</b>	<b>100 %</b>	<b>2.226.421.417</b>	<b>100 %</b>	<b>2.248.685.629</b>	<b>100 %</b>	<b>2.271.172.483</b>	<b>100 %</b>	<b>2.293.884.205</b>		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	1.943.059.655	25 Orang/bulan	1.962.490.251	25 Orang/bulan	1.982.115.153	25 Orang/bulan	2.001.936.304		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	202.767.600	12 Dokumen	204.795.276	12 Dokumen	206.843.228	12 Dokumen	208.911.660		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 Dokumen	41.100.435	250 Dokumen	41.511.439	250 Dokumen	41.926.553	250 Dokumen	42.345.818		

				Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	48 Dokumen	22.207.476	48 Dokumen	22.429.550	48 Dokumen	22.653.845	48 Dokumen	22.880.383		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.050.000	1 Laporan	5.100.500	1 Laporan	5.151.505	1 Laporan	5.203.020		
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	12.236.251	2 Dokumen	12.358.613	2 Dokumen	12.482.199	2 Dokumen	12.607.020		
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>	<b>84.483.455</b>	<b>100 %</b>	<b>85.328.289</b>	<b>100 %</b>	<b>86.181.571</b>	<b>100 %</b>	<b>87.043.386</b>		
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.150.000	1 Laporan	15.301.500	1 Laporan	15.454.515		
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	69.483.455	2 Laporan	70.178.289	2 Laporan	70.880.071	2 Laporan	71.588.871		
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas</b>	<b>100 %</b>	<b>209.085.000</b>	<b>100 %</b>	<b>211.175.850</b>	<b>100 %</b>	<b>213.287.608</b>	<b>100 %</b>	<b>215.420.484</b>		
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.100.000	1 Unit	10.201.000	1 Unit	10.303.010		
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	15.000.000	2 Paket	15.150.000	2 Paket	15.301.500	2 Paket	15.454.515		
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25 Dokumen	5.000.000	25 Dokumen	5.050.000	25 Dokumen	5.100.500	25 Dokumen	5.151.505		

				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.030.000	2 Dokumen	3.060.300	2 Dokumen	3.090.903		
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	3.000.000	25 Dokumen	3.030.000	25 Dokumen	3.060.300	25 Dokumen	3.090.903		
				Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Dipulangkan	1 Orang	2.000.000	1 Orang	2.020.000	1 Orang	2.040.200	1 Orang	2.060.602		
				Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.020.000	1 Laporan	2.040.200	1 Laporan	2.060.602		
				Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	3 Orang	2.000.000	3 Orang	2.020.000	3 Orang	2.040.200	3 Orang	2.060.602		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	20.000.000	4 Orang	20.200.000	4 Orang	20.402.000	4 Orang	20.606.020	-	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	147.085.000	6 Orang	148.555.850	6 Orang	150.041.408	6 Orang	151.541.822		
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>	<b>446.654.851</b>	<b>100 %</b>	<b>451.121.397</b>	<b>100 %</b>	<b>455.632.608</b>	<b>100 %</b>	<b>460.188.932</b>		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	18.202.321	21 Paket	18.384.344	21 Paket	18.568.187	21 Paket	18.753.868		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	104.397.640	32 Paket	105.441.616	32 Paket	106.496.032	32 Paket	107.560.992		

				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	25.865.898	14 Paket	26.124.556	14 Paket	26.385.801	14 Paket	26.649.659		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	90.000.592	8 Paket	90.930.897	8 Paket	91.840.205	8 Paket	92.758.607		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	11 Dokumen	82.658.400	11 Dokumen	83.484.984	11 Dokumen	84.319.833	11 Dokumen	85.163.031		
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	15.000.000	3 Paket	15.150.000	3 Paket	15.301.500	3 Paket	15.454.515		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.500.000	12 Laporan	51.005.000	12 Laporan	51.515.050		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.500.000	12 Laporan	51.005.000	12 Laporan	51.515.050	12 Laporan	52.030.200		
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.050.000	2 Dokumen	5.100.500	2 Dokumen	5.151.505		
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.050.000	2 Dokumen	5.100.500	2 Dokumen	5.151.505		
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1.431.807.872</b>	<b>100 %</b>	<b>3.946.125.950</b>	<b>100 %</b>	<b>1.460.587.209</b>	<b>100 %</b>	<b>1.475.193.080</b>		
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	3 Unit	2.500.000.000	-	-	-	-		

				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	500.000.000	4 Unit	505.000.000	4 Unit	510.050.000	4 Unit	515.150.500		
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90 Unit	231.397.767	90 Unit	233.711.744	90 Unit	236.048.861	90 Unit	238.409.349		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90 Unit	150.000.000	90 Unit	151.500.000	90 Unit	153.015.000	90 Unit	154.545.150		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	75 Unit	550.410.105	75 Unit	555.914.206	75 Unit	561.473.348	75 Unit	567.088.081		
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1.735.496.863</b>	<b>100 %</b>	<b>1.752.851.830</b>	<b>100 %</b>	<b>1.770.380.347</b>	<b>100 %</b>	<b>1.788.084.149</b>		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	2.500.000	6 Laporan	2.525.000	6 Laporan	2.550.250	6 Laporan	2.575.752		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	314.330.098	48 Laporan	317.473.398	48 Laporan	320.648.131	48 Laporan	323.854.612		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Laporan	104.397.640	32 Laporan	105.441.616	32 Laporan	106.496.032	32 Laporan	107.560.992		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	49 Laporan	1.314.269.125	49 Laporan	1.327.411.816	49 Laporan	1.340.685.934	49 Laporan	1.354.092.793		
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>427.294.943</b>	<b>100 %</b>	<b>431.567.891</b>	<b>100 %</b>	<b>435.883.568</b>	<b>100 %</b>	<b>440.242.401</b>		

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	77.749.800	2 Unit	78.527.298	2 Unit	79.312.570	2 Unit	80.105.695		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	49.692.000	14 Unit	50.188.920	14 Unit	50.690.809	14 Unit	51.197.717		
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	13.498.650	30 Unit	13.633.636	30 Unit	13.769.972	30 Unit	13.907.671		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	180.000.000	2 Unit	181.800.000	2 Unit	183.618.000	2 Unit	185.454.180		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	106 Unit	45.952.980	106 Unit	46.412.509	106 Unit	46.876.634	106 Unit	47.345.400		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	106 Unit	60.401.513	106 Unit	61.005.528	106 Unit	61.615.583	106 Unit	62.231.738		
				<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase fasilitasi layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD</b>	<b>100 %</b>	<b>18.147.298.740</b>	<b>100 %</b>	<b>18.328.771.726</b>	<b>100 %</b>	<b>18.512.059.442</b>	<b>100 %</b>	<b>18.697.180.034</b>		
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang /Bulan	17.676.338.568	30 Orang /Bulan	17.853.101.953	30 Orang /Bulan	18.031.632.972	30 Orang /Bulan	18.211.949.301		
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	439.448.172	3 Paket	443.842.653	3 Paket	448.281.079	3 Paket	452.763.889		

				Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	30 Orang	31.512.000	30 Orang	31.827.120	30 Orang	32.145.391	30 Orang	32.466.844		
				<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD</b>	<b>100 %</b>	<b>311.859.556</b>	<b>100 %</b>	<b>467.650.000</b>	<b>100 %</b>	<b>318.127.932</b>	<b>100 %</b>	<b>321.309.211</b>		
				Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	30 Dokumen	15.000.000	30 Dokumen	15.150.000	30 Dokumen	15.301.500	30 Dokumen	15.454.515		
				Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 Laporan	250.000.000	7 Laporan	252.500.000	7 Laporan	255.025.000	7 Laporan	257.575.250		
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	52 Laporan	46.859.556	52 Laporan	200.000.000	52 Laporan	47.801.432	52 Laporan	48.279.446		
				<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>100 %</b>	<b>8.259.826.754</b>	<b>100 %</b>	<b>8.342.425.015</b>	<b>100 %</b>	<b>8.425.849.256</b>	<b>100 %</b>	<b>8.510.097.740</b>		
				<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase fasilitasi pembentukan perda dan peraturan daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1.971.339.265</b>	<b>100 %</b>	<b>1.991.052.656</b>	<b>100 %</b>	<b>2.010.963.181</b>	<b>100 %</b>	<b>2.031.072.811</b>		
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	127.577.544	1 Dokumen	128.853.319	1 Dokumen	130.141.852	1 Dokumen	131.443.270		
				Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	1.221.024.148	12 Dokumen	1.233.234.389	12 Dokumen	1.245.566.732	12 Dokumen	1.258.022.399		
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	202.000.000	1 Dokumen	204.020.000	1 Dokumen	206.060.200		
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	172.737.573	2 Dokumen	174.464.948	2 Dokumen	176.209.597	2 Dokumen	177.971.692		

				Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	252.500.000	1 Dokumen	255.025.000	1 Dokumen	257.575.250		
				<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>100 %</b>	<b>1.573.016.901</b>	<b>100 %</b>	<b>1.588.747.068</b>	<b>100 %</b>	<b>1.604.634.536</b>	<b>100 %</b>	<b>1.620.680.879</b>		
				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	138.785.514	2 Dokumen	140.173.369	2 Dokumen	141.575.102	2 Dokumen	142.990.853		
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	138.468.980	2 Dokumen	139.853.669	2 Dokumen	141.252.205	2 Dokumen	142.664.727		
				Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	387.112.194	1 Dokumen	390.983.315	1 Dokumen	394.893.148	1 Dokumen	398.842.079		
				Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	375.073.701	1 Dokumen	378.824.438	1 Dokumen	382.612.682	1 Dokumen	386.438.808		
				Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	161.501.400	2 Dokumen	163.116.414	2 Dokumen	164.747.578	2 Dokumen	166.395.053		
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	372.075.112	1 Dokumen	375.795.863	1 Dokumen	379.553.821	1 Dokumen	383.349.359		
				<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>100 %</b>	<b>540.845.639</b>	<b>100 %</b>	<b>546.254.095</b>	<b>100 %</b>	<b>551.716.635</b>	<b>100 %</b>	<b>557.233.801</b>		
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan	26.000.000	4 Laporan	26.260.000	4 Laporan	26.522.600	4 Laporan	26.787.826		
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	26.000.000	4 Laporan	26.260.000	4 Laporan	26.522.600	4 Laporan	26.787.826		

				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	26.000.000	4 Laporan	26.260.000	4 Laporan	26.522.600	4 Laporan	26.787.826		
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	26.000.000	4 Laporan	26.260.000	4 Laporan	26.522.600	4 Laporan	26.787.826		
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan	26.000.000	4 Laporan	26.260.000	4 Laporan	26.522.600	4 Laporan	26.787.826		
				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.200.000	1 Dokumen	20.402.000	1 Dokumen	20.606.020		
				Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.200.000	4 Laporan	20.402.000	4 Laporan	20.606.020		
				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	370.845.639	1 Dokumen	374.554.095	1 Dokumen	378.299.635	1 Dokumen	382.082.631		
				<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>100 %</b>	<b>1.163.884.865</b>	<b>100 %</b>	<b>1.175.523.712</b>	<b>100 %</b>	<b>1.187.278.946</b>	<b>100 %</b>	<b>1.199.141.733</b>		
				Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	30 Dokumen	250.000.000	30 Dokumen	252.500.000	30 Dokumen	255.025.000	30 Dokumen	257.575.250		
				Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	727.200.000	3 Dokumen	734.472.000	3 Dokumen	741.816.720	3 Dokumen	749.234.887		
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	15 Dokumen	47.785.221	15 Dokumen	48.263.073	15 Dokumen	48.745.703	15 Dokumen	49.223.160		

				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	95.445.000	7 Orang	96.399.450	7 Orang	97.363.444	7 Orang	98.337.078		
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	26.772.474	1 Dokumen	27.040.198	1 Dokumen	27.310.599	1 Dokumen	27.583.704		
				Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	16.682.170	1 Dokumen	16.848.991	1 Dokumen	17.017.480	1 Dokumen	17.187.654		
				<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>100 %</b>	<b>630.757.984</b>	<b>100 %</b>	<b>637.065.563</b>	<b>100 %</b>	<b>643.436.218</b>	<b>100 %</b>	<b>649.870.580</b>		
				Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	5 Laporan	25.000.000	5 Laporan	25.250.000	5 Laporan	25.502.500	5 Laporan	25.757.525		
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.200.000	1 Dokumen	20.402.000	1 Dokumen	20.606.020		
				Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	585.757.984	3 Dokumen	591.615.563	3 Dokumen	597.531.718	3 Dokumen	603.507.035		
				<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>100 %</b>	<b>390.670.000</b>	<b>100 %</b>	<b>394.576.700</b>	<b>100 %</b>	<b>398.522.467</b>	<b>100 %</b>	<b>402.507.691</b>		
				Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	370.670.000	1 Dokumen	374.376.700	1 Dokumen	378.120.467	1 Dokumen	381.901.671		
				Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.200.000	1 Laporan	20.402.000	1 Laporan	20.606.020		
				<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitas Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>72.312.100</b>	<b>100 %</b>	<b>73.035.221</b>	<b>100 %</b>	<b>73.765.573</b>	<b>100 %</b>	<b>74.503.228</b>		
				Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.250.000	1 Dokumen	25.502.500	1 Dokumen	25.757.525		



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan kinerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Singkawang.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang, indikator kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kota Singkawang dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28

**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD</i>	90%	90%	91%	92%	93%	93%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

1. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan dokumen rencana kerja empat tahun memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, dan disusun dengan berpedoman pada RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026
2. Renstra ini berlaku mulai Tahun Anggaran 2023, berfungsi sebagai arah atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan pelaksanaan anggaran, penyusunan LAKIP, serta pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang.
3. Struktur Sekretariat DPRD Kota Singkawang terdiri atas 3 bagian dan 1 subbagian dan 8 Kelompok Sub-Substansi yang pada tahun 2022 didukung oleh 25 PNS, dengan kewenangan memberikan pelayanan terhadap DPRD Kota Singkawang, di mana secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota Singkawang melalui Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
4. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Sekretariat DPRD Kota Singkawang ditempuh melalui pelaksanaan 2 program, 18 kegiatan dan 92 Sub Kegiatan dengan sumber pendanaan dari APBD Kota Singkawang dengan berorientasi pada sasaran strategis tahunan.
5. Sebagai upaya pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dilakukan proses pemantauan dan evaluasi kinerja melalui analisis hasil pengukuran terhadap indikator kinerja, serta dengan menerapkan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja.

Kaidah Pelaksanaan pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang adalah:

1. Pelaksanaan dan pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang di bawah arahan dan pengendalian langsung Sekretaris DPRD Kota Singkawang yang dibantu oleh para Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Sub Koordinator dan seluruh staf pelaksana sesuai dengan kapasitasnya.
2. Efektivitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan Renstra ini

dilakukan berdasarkan jenjang hirarki struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Singkawang sesuai dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang. Serta Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/431/SETDA.OR-A Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang

3. Demikian Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang disusun sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan, semoga Renstra ini dapat memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan 4 (empat) tahun kedepan (2023 – 2026).

Sekretaris DPRD Kota Singkawang



**KARIM, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641103 198510 1 001